



Buletin

Parlementaria

Nomor 968/III/VII/2017 • Juli 2017



**Pemerintah Jangan Terjebak
Pola Gali Lubang Tutup Lubang**

**Pemberantasan Korupsi
Tak Boleh Dimonopoli KPK**

Arsitek Indonesia Diharapkan Jadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri

**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**

Arsitek Indonesia Diharapkan Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

RUU Arsitek diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendorong peningkatan kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) arsitek Indonesia serta dapat berdikari di negara sendiri dan mampu bersaing di tingkat global.

Demikian harapan Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo di depan Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (11/07/2017) saat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Arsitek menjadi UU Arsitek.

“Saatnya saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek dapat disetujui menjadi Undang-Undang Arsitek?” tanya Taufik, serentak dijawab “setuju” sebagai tanda selesainya pembahasan RUU Arsitek antara DPR dengan pemerintah.

Sigit menambahkan, dengan adanya UU ini, negara hadir dan menjadi penjamin bagi arsitek Indonesia yang berpraktik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan di sisi lain, RUU ini memberi penguatan semangat kerjasama bagi arsitek daerah lainnya untuk peningkatan kualitas layanan praktik dengan mengamankan pemerintah daerah untuk menerbitkan lisensi kepada arsitek sebagai perpanjangan tangan negara.

“Sehingga, dapat membantu terciptanya praktik tertib pembangunan dan memberikan manfaat hasil pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Sigit.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V Lasarus, dalam kesempatan berbeda

mengatakan, pengesahan UU Arsitek menjadi sebuah langkah maju, karena menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara Asean lainnya yang terlebih dulu memiliki UU Arsitek.

Lebih lanjut, RUU ini juga mengatur tata laku praktik arsitek asing di Indonesia agar terjadi persaingan sehat diantara arsitek Indonesia dan asing. Hal ini dimaksudkan, banyak perusahaan asing yang mendatangkan arsitek dari luar. Sementara, arsitek nasional hanya menjadi pemain kedua.

“Diharapkan UU Arsitek menempatkan arsitek kita menjadi pelaku utama atau tuan rumah di negeri kita sendiri,” tandas Lasarus. ■

(ann/sc), foto : jaka.kresno/hr.





Perlu Konsolidasi Pengaturan Tinpidsus Untuk Percepat Pembahasan RUU KUHP

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon membuka acara Diskusi Solusi Nasional dengan tema Quo Vadis RUU KUHP dan KUHP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (06/07/2017). Diskusi Nasional yang diselenggarakan DPR RI tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti pembahasan tentang Revisi RUU KUHP dan KUHP.



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Fadli Zon

bagi RUU KUHP dan KUHP. Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini aspek substantif terkait dengan materi didalam pasal RUU masih menjadi perdebatan. Misalnya bagaimana pengaturan perihal Tindak Pidana Khusus diatur didalam RUU KUHP dan KUHP, terkait asas legalitas dalam pasal 2 RUU KUHP, pidana mati, penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, penyebaran kebencian terhadap pemerintah, dan beberapa pasal yang menimbulkan perdebatan lainnya.

“Pasal-pasal pidana lainnya yang dianggap khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba harus segera dibahas dengan melakukan konsolidasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP bersama KPK, BNN dan seluruh lembaga terkait,” ujarnya.

Fadli menyatakan, pembahasan RUU KUHP ditargetkan akan selesai pada periode ini, namun dengan catatan harus ada komitmen kuat dari beberapa pihak. “Harus ada kerjasama antara DPR dan pemerintah untuk membahas secara bersama-sama dan menampung berbagai masukan sekaligus menyamakan persepsi,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

Fadli berharap, acara diskusi tersebut dapat membawa point-point penting bagi revisi UU KUHP dan KUHP. Hadir sebagai narasumber lainnya pada acara itu yakni Wakil Ketua DPR RI Korkestra Fahri Hamzah, Ketua Panja RUU KUHP dan KUHP DPR RI Benny K. Harman, Ketua Asosiasi Hukum Pidana KUHP dan KUHP Profesor Andi Hamzah, Pakar Hukum Pidana Profesor Syaiful Bakhril, dan DR. Eva Achjani Zulfa. ■

(dep.mp). Foto: Jayadi/hr

Revisi KUHP dan KUHP dipandang beberapa pihak sudah sangat mendesak untuk dipercepat pembahasannya. Banyaknya tumpang tindih peraturan dan perundangan menjadi salah satu alasan mendasar yang ditengarai hanya dapat diselesaikan dalam RUU KUHP dan KUHP.

Untuk mempercepat proses pembahasan, Fadli menyatakan agar pemerintah melakukan konsolidasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus (Tinpidsus) dalam RUU KUHP bersama KPK, BNN dan seluruh lembaga terkait.

“Mengingat KUHP dan KUHP adalah dasar hukum negara yang sangat penting, maka pasal-pasalnya harus sedetil mungkin, agar tidak terjadi penafsiran bebas oleh aparat di lapangan,” ucap Fadli.

Dalam perkembangannya, polemik dalam pembahasan RUU ini dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu aspek teknis dan aspek substantif. Aspek substantif menjadi urgensi

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon Yuliana Puspita,
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2016 Sepakat Dilanjutkan



Suasana sidang Paripurna DPR RI

Semua fraksi di DPR RI menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2016. Namun, banyak catatan kritis sekaligus apresiasi atas kinerja dan prestasi pengelolaan anggaran tahun 2016.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Selasa (11/7/2017), beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan APBN 2016. Apresiasi disampaikan DPR kepada pemerintah menyangkut status pengelolaan keuangan negara yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini capaian langka setelah 12 tahun terakhir.

F-PDI Perjuangan lewat juru bicaranya Andreas Hugo Pariera menyampaikan, WTP tersebut bukti pemerintah telah menjalankan rekomendasi BPK. Catatan kecil yang disampaikan F-PDI Perjuangan adalah perencanaan pajak harus terukur, karena ini menjadi pilar penting APBN. Di sisi lain, struktur utang juga harus diperhatikan agar tak menjadi beban

keuangan di masa mendatang.

Ridwan Bae juru bicara F-PG menyampaikan, capaian WTP ini memperlihatkan pengelolaan APBN semakin baik. Rasio utang dinilainya masih wajar. Dan yang terpenting, pemerintah harus lebih baik lagi mengelola APBN untuk kesejahteraan rakyat. Sementara F-PD dengan juru bicara Wahyu Sanjaya menyerukan, agar pemerintah mempertahankan capaian WTP itu, sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terhadap beberapa kebocoran anggaran.

Wahyu juga menyampaikan, pemerintah mesti meningkatkan kualitas belanjanya untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pertumbuhan dinilainya masih lambat. Ini, katanya, berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Catatan paling kritis justru disampaikan F-Gerindra

yang dibacakan Heri Gunawan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan ekonomi.

Ini terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,394. Artinya, pembangunan hingga saat ini belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan. Tentunya keseluruhan ini menjadi salah satu evaluasi penting terhadap paket-paket program kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan.

Pada bagian lain, realisasi penyerapan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 masih rendah, yakni sebesar Rp. 1.864,27 triliun atau 89,5% lebih rendah dari penyerapan tahun 2015 yang mencapai 91%. Hal ini mencerminkan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan. Kecenderungan penurunan realisasi belanja negara ini diharapkan tidak berlanjut. Jika trend ini terus berlanjut, maka kapasitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan patut dipertanyakan. ■

(mh/sc), Foto: Jakarta



Pertumbuhan Belum Berpengaruh Signifikan

Pertumbuhan ekonomi pada APBN 2016 ternyata tak berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan kehidupan sosial bangsa ini. Pertumbuhan ekonomi pada 2016 yang hanya 5,02 persen kurang memenuhi ekspektasi masyarakat.



Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan menerima draft pandangan fraksi Gerindra terhadap UU Pertanggungjawaban atas APBN 2016 dari Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan

Demikian dikemukakan anggota F-Gerindra DPR RI Heri Gunawan saat membacakan pandangan fraksinya terhadap UU Pertanggungjawaban atas APBN 2016 pada Rapat Paripurna DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Selasa (11/7/2017).

Angka pertumbuhan tersebut, menurutnya jauh dibawah target pemerintah dalam APBN-P 2016 sebesar 5,2 persen. Heri menyebutkan, saat ini pengangguran cenderung naik, kemiskinan makin dalam, dan ketimpangan masih lebar.

Pada sudut pengangguran, misalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2016 sebesar 5,61 persen. Angka tersebut tentu masih jauh dari harapan. Artinya, pertumbuhan yang ada selama ini

belum memberi perbaikan yang signifikan atas masalah pengangguran. "Padahal, pemerintah telah diberi kesempatan untuk membelanjakan anggaran pembangunan hingga Rp 2.082 94 triliun, sesuai postur belanja pada APBN-P TA 2016," ungkap Heri.

Dengan semakin besarnya anggaran pembangunan tersebut, lanjut politisi dari dapil Jabar IV ini, seharusnya tidak hanya konsumsi dan investasi saja yang dapat tumbuh positif, tetapi keseluruhan perekonomian nasional dapat tumbuh positif dan berkualitas dengan stimulasi APBN ini. Idealnya, alokasi anggaran dalam APBN itu juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan kemiskinan.

Sementara soal kemiskinan, faktor utamanya bisa dilihat dari daya beli

masyarakat. Jumlah penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70%), dengan 13,96% diantaranya berada di daerah pedesaan. Tingkat kedalaman kemiskinan pada 2016 mencapai 1,94. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 1,75 pada 2014.

"Lebih jauh, 62,2% penduduk miskin berada di pedesaan, dengan mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian (50,84%). Lebih jauh lagi, kemiskinan di luar Pulau Jawa melebihi kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen," ungkap Heri dalam catatan kritisnya. Bahkan, secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan tercatat sebesar 73,19%, dengan komoditas beras berada di urutan pertama menyumbang 21,8%.

Pemerintah diharapkan bersungguh-sungguh mendorong pembangunan sektor pertanian. Begitu pula pembangunan infrastruktur yang harus memberikan kemudahan pada usaha pertanian. Pemerintah juga diimbau mengambil kebijakan yang melindungi petani dalam skema perdagangan nasional dan internasional.

"Akses modal bagi pertanian pada akhirnya mendorong lahirnya regenerasi petani di desa-desa. Sampai saat ini belum terlihat rencana konkret terkait lembaga pendanaan yang dikhususkan bagi petani yang tidak sekadar mencari keuntungan secara finansial semata, tapi lebih kepada kepentingan negara yang lebih luas," paparnya. ■

(mh/sc), Foto: arief/hr

Pemerintah Jangan Terjebak Pola Gali Lubang Tutup Lubang

DPR RI dan pemerintah telah membahas Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlibat pada pola gali lubang tutup lubang guna memenuhi anggaran untuk menggenjot infrastruktur.



Wakil Ketua DPR RI Korekku Taufik Kurniawan saat memimpin sidang paripurna didampingi Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, kondisi perekonomian global yang belum membaik, berpotensi mempengaruhi ekonomi tanah air. Hal itu seperti mulai membaiknya kondisi perekonomian Amerika Serikat, isu akan dinaikkannya suku bunga The Fed oleh Bank Federal, hingga masalah krisis Timur Tengah yang berpengaruh pada harga minyak dunia.

“Kalau itu menjadi semacam kenyataan, tentu akan berpengaruh

pada ekonomi kita. Perlu pencermatan dengan tren turunnya harga minyak dunia, yang berpengaruh pada penerimaan negara yang semakin kecil,” kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Saat memimpin rapat paripurna ini, Taufik didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (F-PD).

Politisi F-PAN itu juga mengingatkan, defisit anggaran yang mendekati 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) harus mendapat perhatian dari pemerintah. “Ini sudah lampu kuning. Artinya, beban utang kita harus menjadi

semacam catatan khusus. Kerja keras harus dilakukan tidak hanya DPR saja, tapi juga pemerintah, supaya jangan sampai terjadi pola gali lubang tutup lubang,” imbuh Taufik.

Agar pola itu tidak terjadi, Taufik meminta pemerintah mengoptimalkan fungsi program-program melalui pembangunan infrastruktur, namun dengan tidak menggunakan sumber anggaran dari utang. Pemerintah seharusnya menggunakan anggaran sesuai kemampuan APBN.

Taufik juga berharap pemerintah menggenjot program padat karya yang menyentuh sektor riil. Sehingga, bisa meningkatkan peluang lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat kembali merangkak naik. Kesenjangan ekonomi masyarakat pun diharapkan bisa ditekan.

“Khusus masalah kesenjangan ekonomi ini, saya mengusulkan pada optimalisasi dana desa. Dana desa sebetulnya memiliki kedahsyatan untuk bisa mengangkat dan mengurangi kesenjangan di masyarakat, asal prinsip penggunaan anggaran dana desa itu betul-betul juga digunakan untuk program padat karya,” tegas Taufik.

Agar program ini dapat berjalan dengan efektif, ia mengharapkan optimalisasi peran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 70 triliun di APBN, perlu adanya panduan dari pemerintah, guna memaksimalkan dana itu.

“Dana desa mempunyai multiplier effect. Jangan sampai membangun desa, tapi sumber dayanya dari desa lain, bahkan di luar kota. Jika sumber dayanya dari daerah lain, tidak akan berimbas pada masyarakat setempat. Pemerintah tidak perlu merisaukan kesenjangan ekonomi, jika dana desa terserap efektif,” optimis Taufik.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun meminta pemerintah memaksimalkan sektor penerimaan pajak, guna menyokong

anggaran tahun mendatang. Keberhasilan program pengampunan pajak pada tahun ini, bisa menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak.

“Database wajib pajak yang didapatkan pada pelaksanaan pengampunan pajak, dapat dimanfaatkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di luar PNBP. Tapi jangan kemudian meningkatkan target penerimaan pajak, yang dikejar masyarakat menengah ke bawah yang memiliki Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP),” pesan Taufik.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Banggar DPR bersama pemerintah juga membentuk sejumlah Panitia Kerja (Panja) guna membahas RAPBN 2018.

“Pertumbuhan ekonomi pada kisaran asumsi dasar dalam RAPBN 2017, disepakati 5,2-5,6 persen, dari semula 5,4-6,1 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Kemudian laju inflasi disepakati 2,5-4,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 13.300-13.500/USD,” jelas Azis.

Kemudian, tambah politisi F-PG itu, tingkat bunga SPN 3 bulan disepakati sebesar 4,8-5,6 persen. Lifting minyak mentah Indonesia 45-55 US\$/barel, dengan lifting minyak bumi sebesar 771-815 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.194-1.235 ribul barel setara minyak per hari.

DPR dan pemerintah juga menyepakati target pembangunan tahun 2018, diantaranya pengangguran sebesar 5,0-5,3 persen, angka kemiskinan 9,5-10,0 persen, Gini Rasio (Indeks) 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru) sebesar 71,50. ■

(sf/mp), Foto: Jaka/hr

Australia Siap Bantu Riset Geothermal Indonesia

Australia siap memberi bantuan pengetahuan bagi Indonesia yang sedang membangun pusat riset geothermal (energi panas bumi). Banyak pakar geothermal di Melbourne, Australia yang bisa membantu Indonesia.



Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto bersama delegasi Parlemen Australia.

Demikian diungkap Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menerima delegasi parlemen Australia yang dipimpin Kevin James Andrews di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

“Nanti ada kerja sama knowledge, karena kita ingin mendirikan pusat riset geothermal di Indonesia,” kata Agus. Sebelumnya, ia juga mengemukakan bahwa dirinya pernah berkunjung ke New Zealand untuk membicarakan kerja sama riset geothermal.

Pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2017, sambung Agus, akan hadir delegasi dari New Zealand untuk bertemu dengannya di DPR. New Zealand dan Australia siap mendukung Indonesia dalam pengembangan riset energi ramah lingkungan ini. Di hadapan delegasi parlemen Australia, politisi Partai Demokrat itu, menjelaskan, baru 5 persen energi geothermal yang dimanfaatkan di Indonesia.

Selain isu geothermal, pertemuan juga banyak membahas isu-isu ekonomi, politik, dan pendidikan, termasuk terorisme. Di bidang pemberantasan terorisme, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama untuk mengamankan kawasan.

“Pemberantasan terorisme jadi kepentingan bersama. Pemberantasannya pun harus secara global dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu ada pertukaran informasi intelijen untuk memberantas terorisme,” ucap Agus.

Di bidang investasi, Agus memaparkan, pemerintah Indonesia sedang sibuk membangun infrastruktur. Dengan akses infrastruktur yang luas ini, diharapkan investor dari Australia ikut berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Parlemen Australia ini akan mengunjungi Surabaya dan Semarang untuk melihat sejauh mana investasi dari negeri kanguru itu bisa masuk ke tanah air. ■

(mh/sc), Foto: Andri/hr

Penguatan Belanja Diharapkan Mampu Tingkatkan Pertumbuhan 2018

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan beberapa strategi yang akan ditempuh dalam mendukung tema arah kebijakan fiskal tahun 2018 yang berjudul 'Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan'. Salah satu strategi yang akan ditempuh yakni melakukan penguatan kualitas belanja baik itu modal, barang untuk mendorong efektivitas program. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Selasa, (11/07/2017).



Wakil Ketua DPR Korekku Taufik Kurniawan menerima penyampaian Laporan Pembahasan RAPBN 2018 dari Ketua Banggar Aziz Syamsuddin

“Strategi yang akan ditempuh dalam mendukung tema arah kebijakan fiskal yakni melakukan penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, sinergi program perlindungan sosial untuk mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan,” ujar Azis.

Selain itu optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan tax ratio dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan asset negara menjadi strategi yang akan ditempuh guna mencapai target pembangunan tahun 2018.

Mendorong keseimbangan premier serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan melalui pengendalian defisit dan rasio utang juga menjadi strategi yang akan ditempuh dalam realisasi RAPBN 2018.

Sebelumnya Azis Syamsudin juga melaporkan bahwa kisaran asumsi dasar dalam RAPBN 2018 dengan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen, inflasi 2,5-4,5, nilai tukar Rp 13.300 - Rp 13.500 per USD, suku bunga SPN tiga bulan 4,8-5,6 persen, harga minyak mentah Indonesia USD 45-65 per barel, lifting minyak bumi 771 ribu-815 ribu bph, dan lifting gas bumi 1,194-1,235 juta barel setara minyak per hari. ■

(hs/sc), Foto: Iwan/hr

Anthon Sihombing Gantikan Roem Kono jadi Ketua BURT

Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah memimpin rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dengan agenda penetapan pergantian Pimpinan BURT dari Fraksi Golkar, Rabu (12/7). Dalam rapat tersebut hadir anggota dari enam fraksi dari keseluruhan 10 fraksi sehingga dinyatakan sah dan memenuhi kuorum.

Fahri Hamzah yang didampingi Ketua BURT Roem Kono dan Wakil Ketua BURT Elva Hartati menyebutkan, penetapan pergantian Pimpinan BURT dari F-PG dilakukan menyusul surat dari F-PG tanggal 22 Juni perihal pergantian Ketua BURT yang semula dijabat oleh Roem Kono digantikan oleh Anthon Sihombing.

“Apakah usulan dari F-PG ini dapat disetujui? tanya Fahri, serentak dijawab, “setuju” diikuti ketukan palu sebagai tanda

sahnya pergantian pimpinan. Seusai penetapan pimpinan BURT tersebut, Fahri menyerahkan simbolis palu kepada Pimpinan BURT yang baru.

“Kami atas nama pribadi atau pimpinan mengucapkan selamat kepada saudara Anthon Sihombing yang dipercaya sebagai Pimpinan BURT. Kami ucapkan terimakasih kepada pejabat lama,” kata Fahri dengan menitip pesan agar Pimpinan BURT baru tetap berkoordinasi dengan Pimpinan lama, sehingga program yang



sudah ada sebelumnya dapat diteruskan dengan baik.

Ketika diminta tanggapan setelah menjadi Pimpinan baru BURT, Anthon Sihombing mengatakan, akan meneruskan program-program yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Ketua yang lama.

“Kita akan kerja lebih fokus, antara lain demi keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan anggota DPR. Fungsi BURT ini sangat penting dalam pengawasan maka apapun yang terjadi, pengawasan DPR tidak akan pernah berkurang. Mengenai anggaran, masyarakat banyak menganggap bahwa DPR sudah banyak menghabiskan banyak uang negara, padahal anggaran DPR paling rendah, yaitu 0.35 persen dari APBN. Ini yang perlu kita olah bagaimana dengan dana minim itu kesejahteraan, kenyamanan dan kinerja bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua BURT Roem Kono berharap Anthon Sihombing dapat meneruskan program yang telah dicanangkan sebelumnya, terutama mengembangkan parlemen modern, karena dinamika negeri ini semakin maju sehingga diperlukan DPR yang modern. ■



Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah menyerahkan palu pimpinan sidang kepada Ketua BURT yang baru dilantik, Anthon Sihombing.

(ria,mp), Foto: Jakarta/ir

Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran Rp 500 Miliar untuk PPPA

Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Tambahan anggaran ini sangat penting dialokasikan untuk kampanye “Tiga Akhiri”.

Tiga Akhiri itu meliputi, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan. Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana Yambise di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).



Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolban Lubis (kanan) dan Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid (kiri).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolban Lubis itu, menitikberatkan kampanye anti kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan

dan anak. Dan alokasi tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digalang Kementerian PPPA.

“Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian PPPA mengusulkan tambahan anggaran untuk program prioritas berdasarkan data yang valid dan rinci beserta penjelasannya, sehingga mampu menjawab kondisi objektif kompleksitas dan prevalensi permasalahan perempuan dan anak,” papar Iskan saat membacakan kesimpulan rapat.

Pada sisi lain, Komisi VIII juga mendesak Kementerian PPPA agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam melaksanakan program kerjanya. Efektivitas kerja kementerian ini juga jadi catatan penting bagi Komisi VIII, agar terus diperbaiki. ■

(mh/so), Foto: Azka/ir

Komisi IV Pertanyakan Rencana Penghapusan Subsidi Benih Petani

Komisi IV DPR RI mempertanyakan rencana penghapusan subsidi benih yang akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2018 mendatang. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Ad Interim, Siti Nurbaya Bakar di ruang rapat Komisi IV DPR, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

“Bantuan subsidi benih ini masih dibutuhkan. Petani masih berharap terhadap subsidi ini, jika biasanya beli bibit Rp 11 ribu rupiah, dengan subsidi hanya dibeli dengan dua ribu lima ratus, tiba-tiba semua ini ditiadakan, tentu akan memberatkan petani. Kami (DPR-red) tidak tahu ada kebijakan ini. Jika dikatakan ada usulan, iya kami tahu itu, tapi saat itu kami tidak menyetujuinya,” papar Ketua Komisi IV Edy Prabowo yang memimpin rapat tersebut.

Jika dikatakan anggaran dialihkan bantuan benih langsung yang gratis, lanjut Edy, tapi tidak semua petani terjangkau bantuan itu. Bantuan ini tidak mewakili 100 persen petani, ketika bantuan tidak terjangkau, maka mereka membeli sendiri benih, dan disinilah subsidi harga sangat dibutuhkan petani, yakni harga yang murah.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, bahwa subsidi benih ini juga menjadi penyangga terhadap desa mandiri benih. Jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang tidak terserap dengan baik, ia menilai hal itu hanya persoalan mekanisme saja. Pada saat pengusulan Rencana Kerja (RK) Kementerian/Lembaga, saat pembahasan pagu indikatif masih ada anggaran subsidi ini.

“Menjadi sangat aneh jika Kementerian Keuangan mencabut begitu saja subsidi tanpa ada pembahasan terlebih dahulu. Saya menduga ada usulan terlebih dahulu dari Kementerian Pertanian. Kalaupun



Pimpinan Komisi IV DPR RI

Jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang tidak terserap dengan baik, ia menilai hal itu hanya persoalan mekanisme saja.

mau dihapuskan harus ada alasan yang tepat,” tambah Herman.

Menjawab hal itu, Sekjen Kementerian Pertanian Hari Haryono mengatakan bahwa pihaknya belum pernah mengusulkan penghapusan subsidi benih terhadap Kementerian Keuangan. Rencana pencabutan subsidi ini dibahas dalam trilateral dengan satu penjelasan, karena serapannya sangat rendah. Dalam lebih dari tiga tahun berturut-turut subsidi benih ini serapannya sangat rendah, sekitar 25-30 persen.

“Kenapa subsidi pupuk masih ada dengan menggunakan instrument BUMN, karena subsidi pupuk memerlukan high invest dan high technology yang para swasta dan para UMKM tidak bisa masuk di dalamnya jika tidak ada intervensi pemerintah. Sementara pengembangan

benih bisa dilakukan penakaran-penakaran oleh UMKM yang notabene merupakan mitra-mitra kami juga,” jelas Hari.

Di akhir rapat kerjanya, Komisi IV DPR RI sepakat meminta Kementerian Pertanian tetap menjalankan pagu subsidi benih dalam RAPBN tahun 2018 yang akhirnya menjadi salah satu kesimpulan. ■

(ayulsc), Foto: Kresno/hr



<https://ptmbplusagro.wordpress.com>



Komisi V Terima Delegasi Parlemen Afrika Selatan Bahas Air Bersih

Komisi V DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Afrika Selatan. Dalam kunjungan tersebut, delegasi yang dipimpin L.L Zwane meminta masukan terkait penyediaan layanan air dan sanitasi di pemukiman kumuh.



Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena didampingi sejumlah Anggota DPR Komisi V menyerahkan cenderamata kepada delegasi Parlemen Afrika.

“Kami menerima delegasi Parlemen Afrika Selatan, mereka ingin mempelajari bagaimana bangsa Indonesia melalui parlemen membangun penyediaan air dan sanitasi yang layak,” ungkap Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena usai menerima delegasi didampingi Anggota Komisi lainnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Terkait penyediaan layanan air bersih dan sanitasi layak, politisi F-Demokrat ini menjelaskan, Komisi V bersama Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR

telah mendorong program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui gerakan 100-0-100, yakni Kebutuhan Air Minum Terpenuhi 100%, Kumuh 0%, dan Sanitasi 100%.

KOTAKU akan dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 kelurahan/desa. Sementara, pemukiman kumuh yang ada di Indonesia seluas 38.431 Ha, terdiri dari 23.473 Ha berada di wilayah perkotaan dan 11.957 Ha di pedesaan.

Program penanganan kawasan kumuh ini juga merupakan upaya mendukung tercapainya target Sustainable

Development Goals (SDGs) terkait akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.

Selain itu, sambung Michael, untuk mengantisipasi kekurangan air baku saat musim panas, DPR dan pemerintah telah mengembangkan pembangunan bendungan dan embung-embung untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

“Mereka mengapresiasi program yang dimaksud dan delegasi berencana menerapkan hal serupa di Afrika Selatan. Ini menjadi penting, karena pemerintah di sana hanya mampu menyediakan kebutuhan air bersih hanya 80 persen,” jelas Michael.

Disisi lain, meskipun Indonesia memiliki musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, manajemen pengelolaan air dan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekurangan air di masa mendatang.

Sebelumnya, L.L. Zwane didampingi Duta Besar Afrika Selatan Pakamisa Sifuba, mengapresiasi program KOTAKU. Ia mengatakan, kebijakan serupa akan menjadi pertimbangan delegasi untuk mengkaji ulang kebijakan di negaranya.

Menurutnya, tidak ada pemerintah yang bisa memberikan air lebih banyak kepada rakyatnya. Indonesia patut bersyukur karena memiliki curah hujan tinggi dibandingkan wilayah di Afrika dengan curah hujan yang paling rendah.

“Afrika adalah salah satu negara yang tidak beruntung karena kekurangan air, yang hanya bisa kami lakukan adalah mendistribusikan secara merata. Sementara, 20 persen masyarakat masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah,” imbuh Zwane. ■

(ann/sc), Foto: Jakarta/hr

Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Dimonopoli KPK

Rapat Pansus Hak Angket KPK DPR RI mempertanyakan empat hal utama kepada dua profesor ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Zain Badjeber. Empat hal yang ditanyakan oleh Ketua Pansus Hak Angket Agung Gunandjar Sudarsa tersebut antara lain, pertama tentang keberadaan angket dalam Undang-Undang Ketatanegaraan Indonesia, kedua tentang bagaimana posisi angket dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan KPK, ketiga tentang kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan, keempat bagaimana dengan latar belakang sejarah penyusunan pembentukan KPK.

Agun menyampaikan alasan kenapa mengundang dua pakar hukum tata negara ini, selain sebagai pakar hukum tata negara Yusril juga diundang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga Zain Badjeber diundang karena dulu juga pernah terlibat langsung dalam penyusunan Undang-



Pimpinan Pansus Hak Angket KPK DPR RI

Undang Pemberantasan Korupsi. “Pansus Angket meminta masukan dari Prof Yusril dan Prof Zain Badjeber,” ujar Agun saat memimpin RDP di Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dalam pemaparannya, Yusril menegaskan bahwa dirinya tak berdiri dalam satu posisi manapun, di antara pihak yang mendukung atau menolak keberadaan Pansus. Dia mengatakan, tugasnya adalah menerangkan segala yang diminta DPR tentang keterangan akademis, dalam pemaparannya dia mengungkapkan, berupaya secara maksimal untuk tidak melibatkan diri dalam perdebatan politik dan kepetingan politik pihak manapun juga.

Yusril yang pernah menjabat sebagai Mensesneg, dan juga pernah menjadi Menteri Kehakiman, dia menilai DPR berhak untuk melaksanakan hak angket terhadap KPK. Sebab KPK adalah bagian dari eksekutif yang bertugas melaksanakan UU, dan boleh diawasi dalam pelaksanaan UU. Menurutnya, KPK tidak masuk kategori badan yudikatif lantaran bukan lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. KPK juga bukan lembaga legislatif karena tidak memproduksi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah tugas eksekutif. Bukan tugas legislatif atau yudikatif. Timbul pertanyaan dapatkan DPR secara konstitusional melakukan angket ke KPK? Saya jawab, karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan UU itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,” ujar Yusril.

Sementara itu, Zain Badjeber mengatakan,

saat dia menggagas pembentukan KPK dia mengusulkan, agar anggotanya terdiri dari unsur Jaksa dan Polisi yang memang dipilih secara khusus untuk memberantas korupsi. Dia juga mengungkapkan bahwa tugas utama KPK adalah melakukan supervisi dan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum yang permanen, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Sejak awal penggagasan dia juga sudah mewanti-wanti agar jangan sampai pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh KPK.

“Saya menggagas membentuk KPK tapi anggotanya dari Jaksa dan Polisi yang terpilih, bukan mengikut sertakan masyarakat. Jangan KPK ini yang memonopoli pemberantasan korupsi, berarti masih ada lembaga lain, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan,” jelas Zain.

Lebih lanjut, Yusril menerangkan, kewenangan penyelidikan DPR melalui angket adalah untuk menyelidiki efektivitas pelaksanaan UU. Ia mengatakan, hal itu sejalan dengan ketentuan didalam Pasal 203, 204, dan 205 UU MD3. Dia juga mengungkapkan, sejak ada amanat untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi KPK, sudah ada pandangan yang mengkhawatirkan, tumpang tindihnya lembaga itu dengan lembaga penegakan hukum lainnya. Yakni seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Saat itu, Fraksi TNI yang masih ada di DPR, sudah memprediksi terjadinya masalah itu.

Yusril juga menjelaskan, sejak awal KPK memang diberikan kewenangan luar biasa oleh pemerintah dan DPR saat pembentukannya dahulu. Namun dia mengingatkan, bahwa lembaga yang punya kewenangan luar biasa, tidak bisa permanen.

Sebagai contoh, di era Soeharto, ada lembaga Komando Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib). Saat itu, untuk pemulihan keamanan dan ketertiban, merupakan tugas Polri. Namun, presiden memberikan kewenangan kepada TNI lewat Komkamtib. Dalam perjalanannya, Komkamtib banyak dikritik dan menimbulkan sejumlah insiden. “Lalu Komkamtib diakhiri sendiri oleh Soeharto,” ungkap Yusril.

“Yang jelas, suatu lembaga yang dibentuk dalam keadaan serius, darurat, kemudian diberi kewenangan luar biasa,

“Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah tugas eksekutif. Bukan tugas legislatif atau yudikatif. Timbul pertanyaan dapatkan DPR secara konstitusional melakukan angket ke KPK? Saya jawab, karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan UU itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,”

maka sifatnya tidak permanen. Itu jika dilihat dari sistem ketatanegaraan,” imbuhnya.

Dari sisi historis, Yusril menjelaskan hak angket parlemen sudah dipraktekkan, bahkan sejak awal berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Hak angket kembali diberikan kepada DPR Sementara 1950, sempat dimasukkan di UU 7/1954, sebelum akhirnya diberlakukan melalui UU MD3.

“Angket bukan sesuatu yang baru. Jadi, sudah dijalankan di sistem parlementer. Angket itu melekat di DPR. Ketika lahir UU MD3, maka pasal angket yang diatur di UU 7/54 diadopsi di dalamnya karena dianggap sesuai dengan sistem presidensial setelah amandemen UUD 45,” jelas Yusril. ■

(eko/sc), Foto: Iwan/hr



KPK Gagal Dalam Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gagal dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketika terjadi kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), mestinya KPK secara bersamaan melakukan supervisi dan koordinasi ke semua kementerian dan lembaga, agar tak terjadi korupsi lanjutan.



Pimpinan Pansus Hak Angket KPK bersama pakar hukum pidana Romli Atmasasmita

Demikian dikemukakan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita saat memberi keterangan sebagai ahli di hadapan rapat Pansus Hak Angket KPK di DPR yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Dossy Iskandar, Selasa (11/7/2017). “Dalam pengamatan saya, KPK tidak menjalankan koordinasi supervisi maupun pencegahan. Bahasa saya gagal dalam strategi pencegahan,” tegas Romli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut pakar hukum pidana dari Unpad ini, semua aksi penindakan harus dibarengi pencegahan. Romli tak melihat aksi pencegahan dilakukan KPK. Untuk itu, fungsi pencegahan sebaiknya dikembalikan kepada lembaga Ombudsman. Pandangan ini, perlu segera dipertimbangkan pemerintah dan DPR. Fungsi pencegahan, memang harus dikeluarkan dari UU KPK, sehingga tidak ada lagi koordinasi supervisi. KPK sebaiknya langsung saja pada penindakan.

Fungsi pencegahan, sambung Romli, masuk ke KPK seiring dibubarkannya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Ini gerbong kekuasaan baru bagi KPK setelah penindakan. “Jadi intinya kalau saya lihat, KPK lebih mementingkan penindakan daripada pencegahannya. Semua strategi pencegahan KPK seremonial semata untuk menunjukkan KPK ada di sana. Tidak dimonitor secara terus menerus dan dicegah sampai tidak terjadi Tipikor,” papar Romli. ■

(mh/sc), Foto: Iwan/ftr

Banggar Setujui Pemotongan Anggaran Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim

Badan Anggaran DPR telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dalam APBN-P 2017 Senin, (10/07/2017). Anggaran dua kementerian tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menkopolhukam Wiranto dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

Dalam rapat kerja tersebut disepakati pemotongan atau efisiensi anggaran dari Kemenko Maritim sebesar Rp 50 miliar dan Kemenkopolhukam sebesar Rp 40 miliar.

Seperti diketahui, berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja Kemenko Kemaritiman dalam APBN 2017



sebesar Rp 350,5 miliar. Sementara itu anggaran belanja Kemenkopolhukam sebesar Rp 322,9 miliar dalam APBN 2017.

Sementara dalam RAPBN-P 2017, Kemenko Kemaritiman memiliki anggaran belanja sebesar Rp 300,5 miliar atau adanya efisiensi sebesar Rp 50 miliar dari pagu anggaran sebelumnya, sedangkan untuk Kemenkopolhukam menjadi Rp 282,9 miliar atau ada efisiensi sebesar Rp 40 miliar.

Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Banggar Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar pemotongan anggaran tidak lagi dilakukan. "Nanti saat rapat dengan Kemenkeu dan Bappenas kami akan minta agar tidak dipotong lagi karena ini kan mengatur orang," kata Aziz. ■

(hs/sc), Foto: Jayadi/hr



Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin didampingi sejumlah Anggota Banggar DPR berfoto bersama Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan usai rapat.

Komisi XI Setujui Perubahan RAPBN-P 2017

Setelah melakukan rapat kerja dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto Senin, (10/07/2017), Komisi XI Menyetujui revisi asumsi ekonomi yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng pun meminta kepada pemerintah untuk dapat bekerja lebih keras lagi dalam mencapai target pembangunan di tahun mendatang.



Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng (kiri) dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan (kanan)

Beberapa perubahan yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 5,1 persen dalam APBN 2017. Selain itu, inflasi menjadi 4,3 persen, meningkat dari sebelumnya 4,0 persen. Rupiah meningkat dari Rp 13.300 per USD menjadi Rp 13.400 per USD. Serta suku bunga SPN 3 bulan turun dari 5,3 persen jadi 5,2 persen.

Keputusan perubahan itu diperoleh setelah seluruh anggota Komisi XI yang hadir memberikan persetujuannya. Pemerintah pun dituntut untuk lebih bekerja lebih keras dalam mencapai tujuan pembangunan.

"Komisi XI DPR RI telah menyetujui besaran asumsi makro. Dengan adanya persetujuan ini, kita berharap pemerintah akan bekerja keras untuk mencapai target ekonomi," ujar Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng usai mengetuk palu sidang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam pemaparannya menyebutkan bahwa perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perkiraan dari proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF serta Bank Pembangunan Asia (ADB).

Sebagaimana diketahui, beberapa lembaga tersebut memproyeksikan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dari Bank Dunia, IMF sebesar 5,1 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan 5,1 persen, serta Fitch Rating sebesar 5,4 persen. ■

(hs/sc), Foto: andri/hr



Suasana pertemuan kunjungan kerja Komisi VII DPR dengan Parlemen Kroasia di Zagreb

Indonesia Bisa Belajar Kelola Danau dari Kroasia

Indonesia berharap bisa belajar banyak dari tata kelola pengembangan danau dari Kroasia. Kroasia memiliki danau besar yang sangat terawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik mulai dari pembangkit listrik, produksi air bersih hingga mengembangkan pariwisata daerah. Ini bisa menjadi proyek percontohan bagi pengembangan 15 danau di Indonesia yang sudah diprakarsai Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu.

Demikian salah satu poin penting dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR saat bertandang ke Parlemen Kroasia, di Zagreb, baru-baru ini. Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha itu juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi dan Syaikul Islam serta 11 anggota Komisi VII lainnya.

“Kita berharap kerja sama bidang lingkungan antara Indonesia dan Kroasia semakin berkembang ke depannya. Salah satunya adalah pengembangan danau,” papar Satya usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Bidang Lingkungan dan Pendidikan, Sabina Glasovac serta Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Parlemen Kroasia Darko Horva, di Gedung Parlemen Kroasia.

Politisi F-PG itu menambahkan, kerja sama parlemen Indonesia dan Kroasia bisa lebih ditingkatkan khususnya bidang energi dan lingkungan, mengingat kedua negara memiliki



Komisi X Bahas Masalah Pendidikan dengan Delegasi Parlemen Afrika Selatan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih didampingi sejumlah Anggota Komisi X melakukan pertemuan dengan Delegasi Parlemen Afrika Selatan yang ingin mempelajari tentang sistem pendidikan dan masalah sosial yang terkait dengan HIV AIDS.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

telah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Mereka menanyakan apakah semua sudah dibuat regulasinya mengenai hal itu. Saya katakan kepada mereka bahwa dalam dua tahun ini kita dalam tahap penyesuaian untuk mengakomodasi pendidikan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas,” ucap Fikri.

Selain membicarakan tentang pendidikan secara umum, banyak hal lain yang juga di dialogkan, terutama mengenai masalah regulasi, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR. Karena Komisi X membidangi masalah pendidikan, delegasi Parlemen Afrika Selatan juga sempat menanyakan apakah ada pendidikan yang mengakibatkan rendahnya penularan penyakit HIV AIDS di Indonesia.

“Memang ada pendekatan pendidikan yang bersifat preventif atau pencegahan, sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkait lainnya yang membuat persoalan HIV AIDS di Indonesia jauh lebih rendah daripada di Afrika Selatan,” paparnya.

Fikri menyatakan, apa yang baik dari masing-masing negara itu dapat dijadikan bahan pelajaran. Perkembangan perbaikan pembangunan tidak hanya berhenti di meja parlemen, tetapi harus ditindaklanjuti, baik bidang pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. “Ini adalah permulaan, bukan akhir untuk membangun kerjasama yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Afrika Selatan,” pungkasnya. ■

potensi besar dua sektor tersebut. Indonesia dan Kroasia merupakan dua negara yang aktif menandatangani Perjanjian Paris 2015, karena itu diharapkan bisa saling bertukar pengalaman dalam menangani isu-isu perubahan iklim.

“Dari pertemuan kedua parlemen tersebut, kita menaruh harapan besar bahwa Indonesia-Kroasia mampu menjadi mitra yang kuat dalam pengembangan sektor energi baru dan terbarukan serta pengembangan LNG, sebab di Kroasia saat ini sedang dibangun LNG receiving terminal terbesar yang akan beroperasi tahun 2020 mendatang. Ini akan menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki kebutuhan LNG cukup besar,” simpul politisi asal dapil Jawa Timur itu. ■

(sf/mp), Foto: Dokhr

(dep/mp), Foto: Arief/hr

Dewan Sayangkan Anggaran Kemenkop Terus Menurun

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman mengatakan, pihaknya belum memahami penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai penghematan dari Efisiensi Belanja Barang Kemenkop dan UKM sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 sebesar Rp 10.5 Milyar



Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana

“Sehingga alokasi anggaran Kemenkop dan UKM Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 960.7 Milyar, Kami sangat menyayangkan anggaran Kemenkop yang selalu menurun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada

Kemenkop dan UKM,” kata Azam saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/07/2017).

Lebih lanjut kata Azam, Komisi VI DPR juga belum memahami Pagu Indikatif

Kemenkop dan UKM Tahun 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan Nomor: S-398/MK.02/2017 sebesar Rp 963.8 Milyar termasuk didalamnya anggaran Dewan Koperasi Indonesia sebesar Rp14.3 Milyar.

“Atas laporan ini, kami mengamanatkan kepada anggota Komisi VI yang berada di Badan Anggaran untuk menindaklanjuti hasil Raker ini,” jelasnya.

Mengenai Rancangan Awal Kerja Pemerintah Kemenkop dan UKM tahun 2018, Komisi VI mendukung Kemenkop dan UKM untuk belanja langsung ke masyarakat yang mendukung Program Prioritas Nasional tahun 2018.

“Kami meminta agar program prioritas tahun 2018 lebih mengutamakan untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM sesuai Program Nawacita Presiden Jokowi dan untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan Efisiensi Nasional yang berdaya saing tinggi sesuai Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyatakan, memahami mengenai realisasi anggaran Kemenkop dan UKM Tahun 2017 sebesar Rp 250.9 Milyar atau sebesar 25,84 persen dari alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp971.2 Milyar

Komisi VI DPR RI juga dapat memahami kendala yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam merealisasikan alokasi anggaran 2016. Komis VI DPR RI mengapresiasi upaya langkah dan strategi yang dilakukan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran Rp 956.7 Milyar atau 93,97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1 Trilyun. ■

(ria.mp), Foto: Ojifhr

RUU Pertembakauan Harus Kedepankan Kepentingan Petani

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan RUU ini harus diarahkan untuk kepentingan nasional, selain itu yang tak kalah penting juga keberpihakan pada kesejahteraan petani tembakau. Menurutnya yang juga Anggota Komisi XI, meski DPR sudah memiliki niat baik, namun tetap saja DPR masih menjadi sasaran kritik.

“Kita harus bicara kepentingan nasional. Kontribusi penerimaan negara sektor pertembakauan baik itu dari cukai hasil tembakau, pajak, mencapai Rp 200 triliun”, kata Misbakhun saat Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Pertembakauan dengan



Anggota Pansus RUU Pertembakauan DPR RI,
Mukhamad Misbakhun

stakeholders pertembakauan (APTI, SP Tembakau dan Rokok, Asosiasi Tembakau dan Rokok, serta GPPR) di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Dia menyampaikan polemik RUU Pertembakauan cukup menyita konsentrasi, sebagai inisiator RUU Pertembakauan, menurutnya DPR kerap menjadi sasaran kritik apabila kerja untuk rakyat. Sementara disisi lain, dia mengungkapkan apabila bekerja bagi asing justru dipuji-puji. Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan, sebelumnya tak ada undang-undang yang melindungi sektor pertembakauan, baik itu petani tembakau, dan industri hasil tembakau nasional.

Dia juga menyampikan saat DPR membahas RUU Pertembakauan, yang terjadi DPR justru dituduh main mata dengan industri rokok. Misbakhun juga mengaku heran adanya dorongan kelompok anti tembakau yang meminta petani tembakau beralih profesi dengan menanam tanaman lain.

Kalau petani tembakau diminta beralih profesi, apakah kalangan dokter bersedia juga beralih profesi menjadi tukang ojek misalnya. "Itu logika kalangan anti tembakau yang tidak masuk akal," cetus Misbakhun.

Demi kepentingan nasional, dia tidak akan bersedia menggadaikan kesejahteraan rakyat dengan agenda kepentingan asing. Menurutnya, kalau berbicara pertembakauan, dia berharap petani pada saat panen harga tembakau tidak jatuh, adanya penyuluhan bagi petani, perlu adanya riset dari pemerintah sehingga menghasilkan tembakau yang bagus.

"*Stakeholders* pertembakauan butuh perlindungan mengingat belum ada regulasi yang melindungi mereka. Karena itulah, diperlukan RUU Pertembakauan," paparnya. ■ (eko/so), Foto: Iwan/hr

Komisi IX Desak Pemerintah Lakukan Langkah Strategis Lindungi TKI

Komisi IX DPR RI merasa prihatin dengan kondisi TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia. Razia dan penangkapan yang dilakukan Kepolisian Diraja Malaysia sudah semestinya ditanggapi dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah.

Setidaknya, pemerintah harus memastikan bahwa razia dan penangkapan yang sedang terjadi tidak dilakukan dengan kekerasan dan tetap mengedepankan aspek penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi IX Dede Yusuf M. Effendi saat jumpa pers di hadapan para awak media. "Menanggapi isu aktual ini, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melindungi TKI di luar negeri," papar Dede di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Adapun tiga hal yang menjadi penekanan Komisi IX antara lain; yang pertama melakukan upaya diplomasi bilateral kepada pemerintah Malaysia agar TKI di sana diperlakukan secara khusus. Termasuk, mengupayakan agar pengurusan legalitas dokumen kerja dan izin tinggal TKI bisa dipermudah dengan biaya yang tidak memberatkan.

Kedua, mempersiapkan bantuan hukum yang diperlukan sehingga TKI yang terjaring dapat menghadapi proses hukum sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah untuk memfasilitasi keperluan TKI non-prosedural dengan melakukan pendataan yang benar, dan jika diperlukan, membantu biaya keperluan mereka dari anggaran APBN yang ada.

Melihat kompleksnya persoalan



Ketua Komisi IX Dede Yusuf M. Effendi

TKI di luar negeri, di kesempatan ini Komisi IX juga mengharapkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

Berkaitan dengan RUU PPILN ini, Komisi IX DPR menyampaikan, bahwa pembahasan RUU ini sudah sampai pada tahap menyamakan persepsi di tingkat pemerintah terhadap beberapa isu aktual. Salah satu isu aktual yang perlu disamakan adalah terkait pembagian kewenangan antara regulator dan operator dalam penanganan TKI.

"Perlu ditegaskan bahwa sampai saat ini posisi delapan Fraksi di Komisi IX DPR adalah menegaskan perlunya pemisahan kewenangan dan tanggung jawab yang tegas antara Kemenaker dan BNP2TKI. Sejalan dengan itu, kedelapan fraksi menyetujui agar BNP2TKI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, tanpa melalui Kemenaker," ungkap Dede. ■ (eko/so), Foto: Oji/hr

Belum ada Titik Temu, Pansus Pemilu Utamakan Musyawarah Mufakat

Pembahasan lima isu krusial dalam RUU Pemilihan Umum (Pemilu) belum mencapai titik temu. Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy mengatakan, Pansus dan pemerintah masih melakukan tahapan lobi untuk musyawarah mufakat.



Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (kanan) didampingi Anggota Pansus Rufinus Hotmaulana Hutaaruk (kiri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah)

Rapat yang berlangsung hari Senin (10/7/2017) hingga pukul 23.00 WIB itu, Pansus dan pemerintah sepakat menunda pengambilan keputusan terhadap isu krusial. Turut hadir Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. "Rapat kita skors untuk lobi-lobi kapoksi

pada 20 Juli 2017.

Kedua, Pansus bersama pemerintah sepakat pengambilan keputusan tingkat I yang berisi tentang pandangan mini fraksi akan digelar pada Kamis (13/7) pukul 13.00 WIB.

"Ketiga, Pansus sepakat mengadakan rapat internal pada Rabu esok untuk

bersama dengan pemerintah, lobi menyepakati tiga hal," ungkap politisi dari F-PKB ini.

Pertama, Pansus menyepakati tidak ada penundaan pengambilan keputusan di tingkat II. Penetapan RUU Pemilu menjadi UU tetap dilaksanakan

menyepakati sikap Pansus terhadap lima isu krusial sehingga nanti apa yang akan diputuskan oleh internal Pansus, itulah yang akan diambil keputusannya," sambungnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat sejak awal, dari 562 pasal minus 5 disepakati dengan musyawarah. Dari ke - lima isu krusial, empat sudah mulai mengerucut.

"Kamis nanti akan ada pandangan mini fraksi, dan pemerintah juga akan menyampaikan pendapat," katanya.

Diketahui, keempat isu krusial itu adalah: sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi dan ambang batas parlemen. Sementara, terkait ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) masih sulit mencapai titik temu.

Pemerintah berpandangan, besaran ambang batas pencalonan presiden harus dipertahankan di angka 20 persen dari perolehan kursi. Sementara, beberapa Fraksi seperti Gerindra dan PKS mengusulkan 10-15 persen sebagai jalan tengah. F-Demokrat mengusulkan nol persen, usulan ini merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak. ■

(am/isc), Foto: Kresno/hr



Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI Ahmad Riza Patria (kiri) dan Yandri Susanto (kanan) bersama Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro (tengah)

Pansus RUU Pemilu Sayangkan Sikap Pemerintah

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* (PT) pada angka 20-25 Persen.

“Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk diputuskan. Memang dalam RUU Pemilu ini dari lima isu yang muncul merucut kepada satu isu, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Kalau pemerintah mengikuti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka pemerintah tidak bisa ngotot dengan dua puluh persen. Sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini illegal kalau ada PT. Karena pemilu serentak ini memang baru pertama dilakukan,” ujar Riza dalam forum legislasi bersama wartawan koordinatoriat DPR RI di media center DPR, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Kalau tetap ada PT, lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, maka ia meyakini akan banyak pihak yang menggugatnya, karena bertentangan dengan keputusan MK. Dan ia akan menunggu apakah MK akan mengabulkan atau menolak jika kelak ada gugatan terkait hal itu.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto yang menilai sejatinya tidak ada muncul isu kembali ke Undang-Undang yang lama, bahkan isu menerbitkan Perppu dengan menarik diri dari pembahasan pemilu. Karena ada mekanisme musyawarah untuk mufakat. Bahkan jalan terakhir voting atau pengambilan suara. Di sini politisi fraksi PAN ini juga berharap jangan sampai ada semangat “menghabisi” pihak lain dalam pembahasan RUU Pemilu ini.

“Jangan menari dirilah, tidak elok. Apalagi RUU ini menyangkut kepentingan rakyat, jangan pula kembali ke UU Pemilu yang lama,” tambah Yandri.

Dalam kesempatan itu pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan bahwa jangan ada calon tunggal. Karena jika itu terjadi maka akan dipertanyakan apa fungsi partai politik selama ini. Menurutnya berdemokrasi itu bukan saja partisipasi, tapi juga harus ada kompetisi dan kontestasi. “Jika semua itu dipikirkan bersama maka tidak akan ada kata *deadlock*,” tegas Zuhro.

Ia juga mengingatkan agar dalam merevisi Undang-Undang Pemilu ini juga harus berpikir jangka panjang. Kalau tidak, maka pada pemilu 2024 nanti akan menghadapi hal yang sama dan fatal. ■

(ayu/sc), Foto: Andri/hr

Harmonisasi RUU Migas Integrasikan Berbagai Pendapat

Badan Legislasi DPR masih melakukan harmonisasi Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas (RUU Migas). Poin penting yang menjadi perhatian para *stakeholder* adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Harmonisasi yang dilakukan Baleg sampai pada tahap meminta pendapat sejumlah pihak terkait ihwal substansi pada draft RUU Migas.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menargetkan harmonisasi ini bisa secepatnya selesai, agar sebelum akhir masa periode DPR bisa diundangkan. “Kita baru mau harmonisasi, tapi semoga bisa secepatnya diselesaikan,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat Harmonisasi RUU Migas



Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas (kiri) dan Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto (kanan).

di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (11/7/2017) sore.

Harmonisasi yang dilakukan Baleg ini masih tahap meminta pendapat sejumlah pihak terkait ihwal substansi pada draf RUU Migas. Supratman menyampaikan pihaknya masih akan mendengarkan sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan sebagai salah satu pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU Migas.

“Kami masih mendengarkan sejumlah *stakeholder*, kami akan dengarkan pendapat dari *stakeholder* apa saja,” ujar Supratman.

Di lain pihak Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha yang membidangi energi dan sumber daya alam menyampaikan, salah satu poin dalam draft RUU Migas berkenaan dengan BUK Migas, hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi kerja sama dari hulu hingga hilir sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Jadi tidak ada pembubaran salah satu satuan kerja, hanya saja fungsi mereka untuk diintegrasikan tergabung dalam BUK Migas,” jelas Satya.

Pengamat Energi Marwan Batubara mengatakan dalam RUU Migas ini seharusnya ditegaskan tidak akan ada dualisme BUMN yang mengurus sektor migas dari hulu maupun hilir. Dia bilang, integrasi beberapa BUMN dalam BUK Migas harus dipastikan benar-benar solid.

“Kalau memang BUMN mau dibentuk jangan jadi tidak efisien membentuk lebih dari satu BUMN,” kata Marwan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, menurut Supratman pendapat dari pihak yang berkaitan ini sangat diperlukan untuk harmonisasi, karena RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini ditargetkan segera diselesaikan. ■

(eko/sc), Foto: Rumi/hr



Suasana pertemuan Deputi Persidangan Setjen DPR dengan DPRD Kabupaten Pemalang

Deputi Persidangan DPR Jelaskan Tata Cara Kerja AKD DPR RI

Deputi persidangan DPR RI Damayanti mengapresiasi positif keinginan DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah untuk mempelajari dan mengadaptasi berbagai tata cara kerja dan kegiatan alat kelengkapan DPR RI.

“Kedatangan para anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini ingin mempelajari dan mengadaptasi tentang tata cara kerja dan kegiatan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) di DPR RI ini. Untuk itu saya mengapresiasi keinginan dan kedatangan para anggota DPRD ini,” ungkap Damayanti usai menerima delegasi anggota DPRD Kabupaten Pemalang di ruang rapat Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Dilanjutkan Maya, begitu Damayanti biasa disapa, antara DPR RI dan DPRD memang ada perbedaan yang sangat mendasar dari fungsi keduanya dalam undang-undang. Salah satunya DPR RI dalam undang-undang memang menjalankan fungsi legislatif. Sementara

DPRD dalam undang-undang dicantumkan menjadi salah satu “aparatur” dari Pemda.

Hal tersebut menyusul pemaparan Ketua delegasi anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Masruhin Achmadi yang mempertanyakan tidak adanya hirarkis organisatoris antara DPR RI dan DPRD padahal keduanya menjalankan fungsi yang sama yakni fungsi kedewanan. Pada kesempatan itu Ketua delegasi DPRD Kabupaten Pemalang Masruhin Achmadi mempertanyakan cara bekerja dari beberapa alat kelengkapan dewan seperti Bamus (badan musyawarah) dan BK atau Badan Kehormatan (di DPR RI kini dinamakan MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan).

“Di Kami (DPRD Kabupaten Pemalang-red), Bamus sering dianggap sebagai

salah satu alat kelengkapan yang kurang bahkan tidak strategis, padahal menurut kami, itu malah menjadi otak dan jantung dari lembaga ini. Begitupun cara kerja BK kami yang terlihat gamang atau gelisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya yang berkaitan dengan kode etik terhadap anggota dewan yang merupakan teman sendiri. Untuk itu kami mohon diberi pencerahan atas hal ini,” papar Masruhin.

Dalam pertemuan tersebut Maya menjelaskan bahwa meskipun dalam undang-undang kedudukan DPR RI dan DPRD berbeda, namun sejatinya dalam cara bekerjanya antara DPR RI dan DPRD tidaklah berbeda. Banyak hal yang dilakukan oleh DPR RI yang juga bisa diadaptasi atau diterapkan oleh DPRD.

Sebut saja Bamus yang di DPR RI posisinya dinilai sangat strategis. Bamus dibentuk pada awal masa perodesasi keanggotaan DPR RI dimulai,

yang kemudian juga sudah ditentukan beranggotakan sepersepuluh dari jumlah anggota DPR RI. Pimpinan dari Bamus merupakan Ex Officio Ketua DPR RI. Anggota Bamus DPR RI merupakan pimpinan dari fraksi-fraksi, dengan tujuan ketika ada rapat Bamus bisa langsung diambil keputusan saat itu, dan tidak menunggu konsultasi dari pihak lain. Sehingga bisa dikatakan Bamus merupakan DPR mini. Bamus memang lebih ingin menjadwalkan kegiatan apa yang ingin dilakukan DPR RI dalam satu tahun. Misalnya ada jadwal pengambilan keputusan RUU Pemilu dan sebagainya.

Sementara MKD (di DPRD dinamakan BK) dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tata cara beracara yang sudah dibukukan. Sehingga semua sudah diputuskan bersama, baik terkait kode etik anggota dewan atau peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota dan pimpinan DPR RI. Tujuannya tidak lain untuk menjaga marwah, harkat dan martabat anggota DPR RI itu sendiri. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada lagi kegelisahan atau kegamangan ketika akan menyidangkan anggota dewan yang notabene merupakan kolega atau temannya sendiri ketika ada pengaduan yang masuk ke MKD. ■

(ay/usc), Foto: Jayadit/hr

Komisi III Tinjau Lubang Kaburnya 4 Napi WNA Lapas Kerobokan

Komisi III DPR meninjau langsung ke lubang galian bawah tanah yang dipakai kabur oleh empat orang narapidana Warga Negara Asing (WNA) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Badung, Bali, beberapa minggu yang lalu. Hingga kini, warga binaan kasus narkoba itu sudah tertangkap sebanyak dua napi, sementara sisanya masih dalam pencarian.

“Yang menarik dari kasus ini bahwa mereka melarikan diri melalui lubang yang dibuat di bawah tanah dan tembok yang membatasi Lapas Kerobokan ini dengan pagar penduduk di luar. Lubang ini panjangnya 15 meter dan orang bisa jalan didalamnya. Itu ‘kan berarti semacam Katakombe (lorong di bawah tanah),” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, saat memimpin Tim Kunspek Komisi III ke Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (7/7/2017) lalu.

Politisi F-Demokrat itu menambahkan, pihaknya mendapat penjelasan dari Kakanwil Kemenkum dan HAM Bali dan Kalapas Kerobokan, bahwa selama ini lubang itu tidak diketahui. Lubang itu baru diketahui sebelum lebaran, setelah dilakukan pengecekan atau apel umum untuk warga binaan.

“Kita datang untuk memastikan kenapa lubang ini sampai digali, apakah tidak ada pengawasan, apakah tidak ada patroli keliling di Lapas Kerobokan ini. Kalau ada patroli keliling maka pastilah ketahuan adanya lubang ini. Kalau lubang ini digali pastilah ada tanahnya. Lalu, tanahnya ini dibawa kemana,” kata Benny mempertanyakan.

Legislator dari Dapil NTT ini menduga, proses pembuatan lubang itu bukan hanya dalam hitungan minggu, tapi sampai berbulan-bulan. Bahkan, lubang ini digali bukan hanya dari dalam lapas, namun juga digali dari luar, yang kemudian ketemu di tengah-tengahnya. Hasil tinjauan, lubang itu berdiameter itu setidaknya 3 meter dengan panjang 15 meter.

“Kita minta kepada pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk melakukan

penyelidikan terhadap lubang itu. Siapa sebetulnya yang melakukan itu atau siapa yang membiarkan itu dilakukan tentu harus dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin lubang yang panjang begitu tidak diketahui oleh petugas-petugas di lapas disini. Itu kan aneh,” tukas Benny.

Politisi Demokrat itu juga melihat, ada permasalahan utama di Lapas Kerobokan ini, yakni over kapasitas warga binaan. Sehingga, perlu segera diambil langkah cepat untuk mengatasi hal itu. Salah satunya menurut Benny adalah dengan membangun lapas baru untuk menampung seluruh warga binaan, atau dengan memindahkan ke lapas-lapas di daerah sekitarnya, termasuk Lapas Nusa Kambangan.

“Ke depan, harus ada pemikiran dan kebijakan, kalau bisa Presiden RI Joko Widodo mengambil langkah konkret untuk memindahkan lapas ini ke tempat lain atau mungkin meningkatkan pembangunan lapas ini, untuk bisa menangani warga binaan yang jumlahnya sudah mencapai 1.300-an lebih,” harap Benny menambahkan. ■

(w/rmp), Foto: Iwan/hr



Tim Kunspek Komisi III DPR meninjau Lapas Kerobokan di Badung, Bali



Wakil Ketua DPR bidang Korkesra Fahri Hamzah melantik Ketua BURT DPR Anthon Sihombing menggantikan Roem Kono, Rabu (12/7). Foto: Jaka

Raker Komisi III DPR dengan Kemenkumham dipimpin Wakil Ketua Mulfachri Harahap terkait pengawasan kinerja dan Anggaran kementerian, Rabu (12/7). Foto: Andri



Wakil Ketua DPR bidang Korinbang Agus Hermanto melantik Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem kono menggantikan Siti Hediati Soeharto, Kamis (13/7). Foto: Kresno